



Radar Bali

Dewan Bali Apresiasi Pemprov Raih WTP

DENPASAR - Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Seperti disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Bali Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, kemarin (8/6).

Atas capaian tersebut, DPRD Bali sangat mengapresiasi capaian WTP yang diperoleh Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta.

Dikatakan Adi Wiryatama, pemeriksaan yang dilakukan secara substansi merupakan proses penilaian, kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. "Untuk itu kami berharap dengan capaian WTP ini, proses pemeriksaan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, dan pengelolaan Keuangan daerah secara wajib juga diharapkan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan," tegasnya.

Selain itu, dengan raihan opini WTP kali kedua, Adi Wiryatama juga berharap agar capaian ini mampu dijadikan sebagai tantangan kedepan untuk bisa kembali mempertahankan opini WTP dalam tata kelola keuangan di Pemprov Bali yang lebih baik. "Mudah-mudahan, raihan ini juga bisa diikuti oleh pemerintah kabupaten



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

DUKUNGAN MORAL: Gubernur Bali Made Mangku Pastika (dua dari kiri) dapat dukungan Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama (Kiri) atas capaian WTP dari BPK di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, kemarin (8/6).

dan kota se-Bali," harapnya

Sedangkan Wakil DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyatakan, bahwa dengan capaian opini WTP kali kedua yang diraih Pemprov Bali, pihaknya juga sangat mengapresiasi. "Tentu pertama, dengan capaian opini WTP kami sangat bersyukur. Kedua dengan raihan opini WTP kali kedua, kami selaku legislative juga berharap agar dengan raihan (WTP) ini, kedepan Pemprov mampu meraih WTP serupa dengan kualitas yang lebih baik. "Keberhasilan Pemprov Bali meraih opini WTP sekaligus wujud transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sehingga dengan merunut dari maksud dan tujuannya, semoga dengan raihan ini kedepan selain tumbuh kepercayaan public, juga muncul partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan Bali," harapnya.

Selain itu, ditambahkan Sugawa Korry, atas capaian opini WTP, pihaknya juga berharap agar raihan ini tidak hanya dipandang sebagai prestasi administratif yang normatif semata. Melainkan, kata Sugawa

Korry, capaian ini harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov Bali), sekaligus tantangan besar untuk terus mempertahankannya dengan kualitas yang semakin meningkat.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan, bahwa LHP yang diserahkan BPK RI merupakan tolak ukur untuk mengetahui tingkat tertib administrasi tata kelola keuangan yang telah dilaksanakan yang dapat dijadikan pedoman tata kelola tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, masih dalam kesempatan itu, Anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi juga menyatakan, bahwa selain Pemprov Bali, enam pemerintah kabupaten/kota di Bali juga meraih opini WTP. Sedangkan 3 kabupaten masih dengan predikat Wajar Dengan pengecualian (WDP). "Mudah-mudahan, kami berharap kedepannya seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Bali mendapatkan predikat WTP," pungkasnya. (advertorial/pra/djo)

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 23



DEWAN KORUPSI

Sueca Segera Dinonaktifkan

NEGARA - Setelah kasus korupsi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi untuk kepentingan perusahaan mulai disidangkan, pimpinan DPRD Jembrana langsung menurunkan surat. Surat ini mendesak pimpinan partai guna segera menonaktifkan anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara. Informasi yang dihimpun koran ini di DPRD Jembrana menyebutkan, pasca dikeluarkan surat dari pimpinan DPRD Jembrana, lembaga ini bergerak cepat. Rombongan beranggotakan beberapa anggota DPRD Jembrana, Senin kemarin (8/6) terbang ke Jakarta. Mereka akan melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Departemen Dalam Negeri guna mengambil langkah penonaktifan anggota DPRD Jembrana dari PDIP Jembrana tersebut.

Tidak hanya kalangan DPRD Jembrana yang sibuk mempersiapkan hal ini. DPC PDIP Jembrana juga sudah melakukan antisipasi jika proses penonaktifan kadernya harus segera dilakukan. Ketua DPC PDIP Jembrana Made Kembang Hartawan mengakui itu saat dikonfirmasi terpisah kemarin. Menurutnya, pihaknya menggelar rapat, Senin (8/6) untuk menanggapi surat pimpinan DPRD Jembrana tersebut.

"Kami hanya melakukan antisipasi jika pimpinan DPRD Jembrana meminta segera mengajukan pengganti Sueca Antara nanti. Kalau itu yang dikehendaki pimpinan DPRD Jembrana, kami sudah siap. Karena ada caleg yang perolehan suaranya berada di bawah Sueca Antara," kata Kembang, kemarin.

Menurut data koran ini, PDIP Jembrana menempatkan 14 anggotanya di DPRD Jembrana periode 2014-2019. Dari jumlah tersebut, daerah pemilihan Jembrana IV Kecamatan Jembrana, Dapil di mana Made Sueca Antara, berasal, menyumbang tiga orang anggota. Ketua DPRD Jembrana saat ini, I Ketut Sugiasa mendapat dukungan 5.734 suara. Selain Sugiasa, Ida Bagus Susrama berhasil merebut salah satu kursi di DPRD Jembrana dengan 3.675 suara.

Sementara Made Sueca Antara berada di posisi ketiga dengan dukungan 2.832 suara. Apabila induk partai menarik yang bersangkutan dari posisi anggota DPRD Jembrana karena kasus korupsi BBM bersubsidi, maka orang yang diprediksi menggantikannya adalah Dewa Komang Wiratnadi. Hasil perolehan suara Dewa berada di bawah Made Sueca Antara dengan dukungan 2.223 suara.

Dengan raihan suara sebanyak ini, Dewa Wiratnadi sangat berpeluang menempati kursi DPRD Jembrana apabila ditinggalkan Sueca. Karena tiga orang calon lainnya, Ni Made Dwi Ayu Putriani, Ni Putu Erik Anggreni dan Ni Putu Muriani hanya meraih suara di bawah 300 dukungan. (don/djo)

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 23



Radar Bali



BERI KETERANGAN : Kajari Denpasar Imanuel Zebua (kanan) dan Kasintel Syahrir Sagir kemarin memberi keterangan terkait pemeriksaan PD Parkir.

MIFTAHUDDIRADAR BALI

Kejari Beber Pemeriksaan Kasus PD Parkir

DENPASAR – Pihak Kejaksaan negeri (Kejari) Denpasar kembali membeber pemeriksaan kasus dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar. Kemarin, dua orang saksi kembali diperiksa tim jaksa untuk mendapatkan data terkait indikasi penyimpangan. Usai melakukan pemeriksaan, Kasi In-

tel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir memberi penjelasan secara resmi. “Kami tadi melakukan pemeriksaan untuk Kasus PD Parkir. Kami memeriksa dua orang Kasi (Kepala Seksi),” jelas Syahrir saat memberi penjelasan di ruang lobi Kejari Denpasar dengan Kajari Denpasar

Immanuel Zebua.

Syahrir yang ketua tim jaksa kasus ini mengatakan bahwa yang diperiksa adalah Kasi Umum dan Kepegawaian, I Gede Ngurah Ardana dan Kasi Keuangan, Dewa Gede Luhur Wiradnyana ■

► *Baca Kejari... Hal 31*

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015
Hal : 21



Radar Bali

Pemeriksaan Kasus PDAM dan BPD Berlanjut

■ KEJARI...

Sambungan dari hal 21

Syahrir ikut memeriksa bersama dengan jaksa Gusti Widana untuk Kasi I Gede Ngurah Ardana. "Saya dengan Pak Gusti Widana memeriksa yang Ngurah Ardana," ungkapnya.

Sedangkan untuk Kasi Keuangan Luhur Wiradnyana diperiksa jaksa Agung Jayalantara. "Pak Agung Jayalantara memeriksa Luhur Wiradnyana," ungkapnya.

Materi pemeriksaan masih mendalami secara menyeluruh kondisi di PD Parkir Kota Denpasar. "Kami tidak bisa jelaskan secara mendalam, karena ini masih tahap penyelidikan. Intinya, kami mendalami semua hal di PD Parkir," tegasnya.

Pemeriksaan lainnya dilakukan terkait kasus dugaan korupsi PDAM Karangasem. Tim Jaksa kemarin memeriksa tiga orang, yang pertama adalah Sekkab Karangasem, Gede Adnya Mulyadi, Kabag Ekonomi Karangasem Made Sutrisna dan Kasubag di Bagian Ekonomi Kadek Erna. Tiga orang ini diperiksa sampai *sandikala* (petang hari) sekitar pukul 18.30 di Kejati Bali.

Tiga orang ini diperiksa di "ruang biru" sebutan orang Kejati, lokasinya di lantai dua Kejati Bali. Yang memeriksa adalah jaksa Rochida, dan sudah diperiksa sejak pukul 11.00 sampai jelang malam. "Ada tiga orang yang diperiksa, Sekda, Kabag Ekonomi dan Kasubag," ungkap sumber koran ini di Kejati Bali.

Akhirnya setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiga orang ini turun. "Saya memberikan penjelasan, namun silakan tanyakan ke Jaksa,"

ujar Kabag Ekonomi Sutrisna. Hal sama juga dikatakan Sekkab Gede Adnya, dia mengakui memang terkait kasus PDAM. Namun tetap tidak mau menjelaskan. "Maaf ya, maaf teman-teman wartawan," kilahnya sambil masuk ke mobil. Sedangkan Kasubag Kadek Erna, terus mengalihkan wajahnya.

Pemeriksaan lainnya adalah terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, yang sudah cukup lama tidak terdengar kabar, setelah ada tersangka I Wayan Sukarja. Nah kemarin, akhirnya diperiksa Kepala Cabang BPD Tabanan Ida Bagus Ari dan satu orang BPD Bali bernama Agung. Kasus ini merugikan BPD Bali Rp 2,4 miliar dan pelakunya adalah orang dalam BPD Tabanan.

"Ada dua yang diperiksa, satu Kepala Cabang BPD Tabanan Ida Bagus Ari dan Agung dari BPD Bali," ungkap sumber koran ini. Dia mengatakan ada dua jaksa yang memeriksa, salah satunya adalah Wayan Suardi. Informasinya hari ini akan dilanjutkan pemeriksaan. Dan disebut-sebut Dirut BPD Bali Suja yang akan diperiksa.

Dikonfirmasikan ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan memang ada pihak BPD yang diperiksa. "Penyidikan kasus korupsi BPD sedang masuk pemeriksaan lagi. Ada beberapa yang diperiksa, namun saya belum dikasi nama-namanya dari teman yang nyidik," jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, setelah dilakukan gelar perkara dipastikan kasus ini korupsi. Dan menetapkan satu tersangka orang BPD I Wayan Sukarja. Ashari mengatakan memang dari segi kerugian Rp 1,7 miliar namun jika dihitung sampai bunga, dana itu menjadi Rp 2,4 miliar. (timRB)

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 31



Radar Bali

Warga Keluhkan Pungli di KPN

Rp 3 Juta Per Bidang untuk Pemecahan Sertifikat

NEGARA - Sejumlah masyarakat yang mengurus sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Negara (KPN) Jembrana mengaku kesal dan kecewa. Ini gara-gara pihak Kantor Pertanahan Jembrana menerapkan pungutan tambahan Rp 3 juta per bidang untuk pemecahan sertifikat. Namun Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Jembrana, I Ketut Suarta membantah ada pungutan sebesar Rp. 3 juta selain tarikan resmi yang sudah ditetapkan.

Sejumlah warga yang mengurus pemecahan sertifikat tanah, Senin (8/6) kemarin mengatakan, mereka sangat kaget saat mendapati kenyataan harus membayar dana tambahan Rp 3 juta per bidang. Misalnya, kalau pemilik tanah ingin memecah tanahnya menjadi lima bidang, tiap bidang dikenakan dana tambahan senilai Rp 3 juta di luar tarif resmi yang dikenakan selama ini.

"Katanya, dana Rp 3 juta tersebut dibagi untuk dua kepala seksi di Kantor Pertanahan masing-masing Rp 1 juta. Sedangkan dana Rp 1 juta lainnya digunakan untuk Kepala Kantor Pertanahan. Dana ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada petinggi Kantor Pertanahan," tegas warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (8/6) kemarin.

Dikatakan, dana ini sebenarnya sudah mulai ditarik sejak 1 Juni lalu berdasarkan kesepakatan para peserta rapat. Penarikan dana sebesar itu dari warga yang mengurus pemecahan sertifikat tanah dihasilkan dalam rapat antara Notaris se Jembrana dengan Petinggi Kantor Pertanahan Jembrana tanggal 28 Mei 2015 lalu di Hotel Jimbarwana.

Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Jembrana I Ketut Suarta membantah adanya pungutan tersebut. "Kalau ada pihak yang berani melakukan pungutan dana sebesar itu, jelas sangat tidak pantas dilakukan terhadap masyarakat. Pungutan dana Rp 3 juta per bidang tanah bagi orang yang ingin me-

mech sertifikat adalah sangat memberatkan," katanya saat dikonfirmasi, kemarin. Ditanya apa benar ada pertemuan antara kedua pihak di Hotel Jimbarwana, ia mengatakan benar ada pertemuan. Hanya saja pertemuan itu digelar untuk melakukan sosialisasi kepada para notaris berkaitan dengan sistem kerja online notariat. Namun ia mengaku tidak tahu kalau ada kesepakatan lain selain sosialisasi tersebut. Karena ia sendiri tidak hadir dalam rapat itu karena ditugaskan mewakili Kepala Kantor mengikuti Sidang Paripurna DPRD Jembrana.

Menurut Suarta, kalau benar ada pungutan seperti itu, sebaiknya dibatalkan karena sangat memberatkan masyarakat. Apalagi pungutan tersebut tanpa membedakan luas dan lokasi tanah. "Bagaimana kalau warga kurang mampu yang mengurus pemecahan sertifikat tanah warisan? Kalau mereka juga dibebankan biaya sebesar itu, jelas sertifikat mereka tidak akan pernah jadi. Karena mereka tidak sanggup membayar biaya pemecahan sertifikat," katanya. **(don/gup)**

Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Hal : 29